

Analisis Permukiman Kumuh di Banjar, Ampenan: Infrastruktur, Sosial Ekonomi, dan Dampak Lingkungan

Ghina Athiya Amru¹, Rini S. Saptaningtyas², Farhan Assegaf P.Y³, Baiq Tiara Sufi Maharani⁴, Aya Ashfiya Rizky⁵

¹ Ghina Athiya Amru, Program Studi Arsitektur, Universitas Mataram

² Rini S. Saptaningtyas, Program Studi Arsitektur, Universitas Mataram

³ Farhan Assegaf P.Y, Program Studi Arsitektur, Universitas Mataram

⁴ Baiq Tiara Sufi Maharani, Program Studi Arsitektur, Universitas Mataram

⁵ Aya Ashfiya Rizky, Program Studi Arsitektur, Universitas Mataram

Email: ghinaathiya58@gmail.com

Abstrak

Permukiman memiliki peran penting dalam mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan fokus pada tiga aspek utama: infrastruktur dasar, kondisi sosial-ekonomi, dan dampak lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki karakteristik permukiman yang padat, tidak tertata, dan minim fasilitas dasar seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, masyarakat umumnya bekerja di sektor informal dengan tingkat pendidikan rendah, yang memperkuat siklus kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Permukiman ini juga rentan terhadap risiko lingkungan seperti banjir dan pencemaran akibat buruknya pengelolaan limbah. Penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Banjar memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penataan ruang yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Infrastruktur Dasar, Sosial Ekonomi, Dampak Lingkungan, Kelurahan Banjar

Abstract

Settlements play a vital role in reflecting community welfare and the quality of regional development. This study aims to analyze slum conditions in Banjar Subdistrict, Ampenan District, Mataram City, focusing on three main aspects: basic infrastructure, socio-economic conditions, and environmental impacts. A descriptive qualitative approach was applied through field observations, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the area is characterized by densely populated and unplanned housing, with limited access to essential infrastructure such as roads, drainage, clean water, and sanitation. Most residents work in the informal sector and have low levels of education, perpetuating poverty and limiting access to public services. The area is also vulnerable to environmental risks such as flooding and pollution due to poor waste management. Addressing slum issues in Banjar requires an integrated approach, including infrastructure improvement, community empowerment, and participatory, sustainable spatial planning.

Keywords: Slum Settlement, Basic Infrastructure, Socio-Economic, Environmental Impact, Banjar Subdistrict

Article history: Received; 2025-06-19 Revised; 2025-12-22 Accepted; 2025-12-29

PENDAHULUAN

Permukiman memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah karena merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menghuni suatu kawasan. Dalam pengertian ideal, permukiman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi warga (Winarso, 2011). Konsep ini selaras dengan pendekatan livable settlement yang menekankan pentingnya integrasi antara infrastruktur dasar, layanan publik, serta iklim sosial yang kondusif (Pacione, 2009). Oleh karena itu,

kualitas permukiman kerap dijadikan indikator keberhasilan pembangunan kota dan tingkat kesejahteraan penduduk ((United Nations Human Settlements Programme, 2016)).

Namun, kenyataan di berbagai kota di Indonesia masih menunjukkan keberadaan permukiman yang masuk dalam kategori kumuh, dengan penurunan kualitas baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Firman (2004) mengungkapkan bahwa tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan umumnya merupakan akibat dari proses urbanisasi yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang memadai, keterbatasan akses terhadap lahan, serta lemahnya sistem penyediaan perumahan yang terjangkau. Kekumuhan tidak hanya muncul karena masalah fisik, tetapi juga karena ketimpangan sosialekonomi dan kurangnya intervensi kebijakan yang berpihak pada kelompok marginal (Indriani, 2017).

Kawasan kumuh umumnya dicirikan oleh tingginya kepadatan bangunan, tata letak hunian yang tidak teratur, kurangnya infrastruktur dasar seperti saluran drainase dan akses jalan, serta layanan publik yang minim, seperti pasokan air bersih dan sanitasi yang layak (Firman, 2004) . Kawasan semacam ini sangat rentan terhadap berbagai risiko lingkungan, seperti banjir, kebakaran, dan pencemaran air, yang diperburuk oleh tingginya kepadatan dan lemahnya pengelolaan lingkungan (Saputra & Hapiz Hermansyah, 2022) . Dalam konteks ini, isu kerentanan menjadi penting untuk ditelaah karena adanya keterkaitan antara kemiskinan, degradasi lingkungan, dan eksklusi sosial (Upaya et al., 2023).

Salah satu contoh nyata kondisi tersebut terdapat di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Lokasi ini berada dekat muara Sungai Jangkuk dan kawasan pesisir, menjadikannya rawan terhadap bencana seperti banjir rob, abrasi pantai, dan pencemaran lingkungan (Rustiadi et al., 2015). Di bidang infrastruktur, ditemukan berbagai kekurangan seperti jalan lingkungan yang sempit dan belum beraspal, saluran air yang tersumbat, serta ketiadaan fasilitas pengolahan limbah domestik yang memadai (BPS Kota Mataram, 2024). Hal ini senada dengan hasil studi UNDP (2021) yang menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dasar sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko lingkungan.



Gambar 1. Kelurahan Banjar, Kota Ampenan
Sumber: Google Maps

Dari sisi sosial ekonomi, sebagian besar warga di wilayah ini bekerja di sektor informal, seperti nelayan, pedagang kecil, dan buruh. Tingkat pendidikan dan

keterampilan yang rendah membatasi akses terhadap pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan cukup, sehingga banyak keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Ditambah lagi, kebiasaan hidup bersih dan sehat belum menjadi bagian dari budaya masyarakat, yang turut berkontribusi pada buruknya sanitasi dan kondisi lingkungan (Etqia Hanina et al., 2024). Satterthwaite (2003) menekankan bahwa persoalan sosialekonomi di kawasan kumuh tidak terlepas dari akar struktural ketimpangan dan keterbatasan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap tekanan eksternal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi aktual permukiman kumuh di Kelurahan Banjar. Tiga aspek utama menjadi fokus utama, yakni (1) kualitas infrastruktur permukiman, (2) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta (3) dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi tersebut. Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi penanganan kawasan kumuh yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.

Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menganalisis berbagai permasalahan di Kelurahan Banjar dengan pendekatan yang menyeluruh. Analisis dimulai dari aspek infrastruktur dasar—termasuk jaringan jalan, drainase, sanitasi, dan air bersih kemudian berlanjut pada tinjauan terhadap aspek sosial ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Selanjutnya, penelitian juga mengulas dampak lingkungan, terutama yang berkaitan dengan bencana dan kerusakan ekosistem akibat penataan ruang yang tidak optimal. Analisis penyebab kekumuhan turut dilakukan, baik dari sisi kebijakan, kondisi geografis, maupun perilaku masyarakat, untuk merumuskan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika kekumuhan di Kelurahan Banjar secara utuh. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kondisi fisik permukiman, kualitas hidup masyarakat, serta interaksi antara faktor-faktor sosial dan lingkungan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh, guna merumuskan strategi penataan permukiman yang lebih inklusif dan partisipatif.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif. Temuan yang diperoleh dapat dijadikan dasar dalam perencanaan kebijakan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam perumusan program-program peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Bagi masyarakat sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan permukiman, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam perbaikan kondisi hidup mereka.

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan kawasan yang tidak layak huni akibat berbagai faktor, seperti kondisi bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, serta buruknya kualitas prasarana dan sarana lingkungan yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh ditandai oleh ketidakteraturan tata letak bangunan, rendahnya kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi, serta kepadatan hunian yang melampaui batas standar teknis maupun kesehatan yang telah ditetapkan (Aguspriyanti et al., 2020). Selain itu, menurut Suparlan (1984), permukiman kumuh juga

mencerminkan penurunan kualitas hunian yang signifikan dan tidak lagi memenuhi standar kebutuhan dasar manusia dalam bermukim (Yuliani, 2019).

b. Aspek Infrastruktur dan Permukiman Kumuh

Infrastruktur merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kekumuhan suatu kawasan permukiman. Berbagai faktor fisik seperti keterbatasan aksesibilitas, kondisi jalan lingkungan yang rusak atau tidak layak, tingginya kepadatan bangunan, serta sistem drainase dan sanitasi yang tidak berfungsi dengan baik, menjadi penyebab dominan munculnya kekumuhan (Aguspriyanti et al., 2020). Selain itu, kurangnya sistem pengelolaan sampah yang memadai turut memperburuk kondisi lingkungan. Contohnya dapat ditemukan di kawasan Kertapati dan Pohuwato, di mana buruknya saluran air dan tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah menyebabkan banjir, kualitas sanitasi yang rendah, serta pencemaran lingkungan yang serius (Yulianti, 2019).

Dalam sejumlah kasus, keterbatasan ruang juga memaksa warga membangun rumah secara berdesakan, seringkali tanpa mempertimbangkan ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Hal ini semakin memperburuk kualitas lingkungan permukiman dan meningkatkan risiko terhadap kesehatan penghuninya (Gobel & T. Zees, 2022).

c. Aspek Sosial Masyarakat di Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh umumnya dihuni oleh kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, buruh harian, atau pelaku jasa nonformal lainnya (Handryant, 2011). Kondisi sosial ekonomi yang lemah ini, ditambah dengan rendahnya tingkat pendapatan, menyebabkan keterbatasan dalam mengakses fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. Akibatnya, kemampuan mereka untuk memperbaiki kualitas hunian dan lingkungan tempat tinggal menjadi sangat terbatas.

Selain itu, dalam permukiman padat di kota-kota besar, sering dijumpai fenomena rumah yang difungsikan ganda sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Banyak rumah digunakan sebagai ruang produksi, kios kecil, atau warung, bahkan ruang terbuka seperti halaman dan gang sempit turut dimanfaatkan sebagai area untuk bekerja atau berjualan (Handryant, 2011). Fenomena ini mencerminkan bagaimana keterbatasan ekonomi dan ruang mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fungsi tempat tinggal demi menunjang kehidupan sehari-hari.

d. Dampak Lingkungan dari Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, terutama terkait aspek kebersihan, sanitasi, dan kualitas air. Salah satu permasalahan utama adalah pembuangan sampah dan limbah domestik secara sembarangan, yang kerap kali langsung dialirkan ke sungai atau badan air terdekat. Praktik ini menyebabkan pencemaran air, pendangkalan sungai, dan terganggunya fungsi ekosistem perairan. Contoh nyata dapat ditemukan di permukiman pesisir Tanjung Riau dan Desa Pohuwato Timur, di mana limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan (Aguspriyanti et al., 2020). Bahkan, di beberapa kawasan, tanggul dijadikan sebagai tempat buang air besar karena tidak tersedia fasilitas sanitasi dasar (Gobel & Zees, 2022).

Dampak lingkungan lainnya meliputi meningkatnya risiko penyebaran penyakit, banjir akibat saluran air yang tersumbat atau tidak berfungsi, serta kerusakan habitat perairan. Kondisi ini tidak hanya merusak daya dukung lingkungan, tetapi juga memperburuk tingkat kesehatan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut (Gobel & Zees, 2022).

e. Indikator Penilaian Permukiman Kumuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 02/PRT/M/2016, indikator permukiman kumuh diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik mencakup kondisi bangunan, seperti kepadatan, kualitas, dan keteraturannya, serta prasarana dasar seperti jalan lingkungan yang dinilai dari aksesibilitas dan kualitasnya, sistem drainase, fasilitas sanitasi, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Sementara itu, aspek non-fisik meliputi kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, serta status legalitas lahan (Aguspriyanti et al., 2020).

Permukiman yang tidak memiliki legalitas lahan, terutama yang tumbuh di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, cenderung berkembang secara tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kekumuhan di kawasan tersebut (Yulianti, 2019).

Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam situasi permukiman kumuh di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang membentuk kompleksitas kawasan kumuh secara menyeluruh, meliputi infrastruktur fisik, kondisi sosioekonomi masyarakat, serta dampak lingkungan yang terjadi. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa angka atau statistik, tetapi juga berdasarkan pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, dan interpretasi langsung dari warga dan pelaku yang tinggal di kawasan tersebut. Lokasi penelitian, Kelurahan Banjar, dipilih karena merupakan wilayah pesisir dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta menampilkan karakteristik permukiman kumuh, seperti rumahrumah yang berdempetan dengan tata ruang yang tidak teratur, jalan sempit, kurangnya sistem drainase dan sanitasi, serta keterbatasan fasilitas dasar lainnya. Wilayah ini memiliki luas sekitar 13,24 hektare yang terbagi ke dalam tiga lingkungan dan tujuh belas Rukun Tetangga (RT). Secara geografis, Kelurahan Banjar berbatasan dengan Kelurahan Ampenan Tengah di utara, Kelurahan Bintaro di selatan, Kelurahan Pejeruk di timur, dan Laut Bali di barat, sehingga rawan terhadap ancaman banjir rob dan pencemaran pesisir.

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, peneliti menerapkan tiga teknik utama pengumpulan data, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi fisik permukiman, seperti bangunan, jalan, sistem drainase, dan fasilitas umum seperti MCK dan tempat pembuangan sampah, guna mendapatkan gambaran nyata tentang kualitas infrastruktur yang ada. Wawancara semiterstruktur dilakukan kepada sejumlah informan kunci yang dipilih secara purposif, seperti warga, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta aparat kelurahan, dengan tujuan menggali informasi mengenai kondisi sosioekonomi,

tantangan yang mereka hadapi, serta pandangan mereka terkait upaya peningkatan kualitas permukiman. Dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi kelurahan, laporan instansi terkait, data statistik, serta fotofoto yang menunjukkan kondisi lapangan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan tematik, yang mengelompokkan informasi berdasarkan kategorikategori utama seperti infrastruktur, kondisi sosialekonomi, dan dampak lingkungan. Proses analisis mencakup pembacaan menyeluruh, penafsiran makna informasi, perbandingan antar temuan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antar aspek yang diteliti. Validitas data dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Banjar sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas permukiman yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Banjar terletak di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, wilayah ini berada di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 3-5 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan pantai di sebelah barat. Wilayah ini juga dilalui oleh Sungai Jangkok yang menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika lingkungan di kawasan tersebut.

Karakteristik permukiman di Kelurahan Banjar menunjukkan adanya kawasan padat penduduk, terutama di wilayah RT 07 hingga RT 09. Banyak dari hunian di wilayah ini berada sangat berdekatan tanpa perencanaan tata ruang yang jelas. Sebagian besar rumah dibangun secara swadaya oleh masyarakat berpenghasilan rendah, menggunakan material bangunan semi permanen dan tidak memenuhi standar kelayakan huni.

Keberadaan permukiman di sekitar bantaran sungai dan wilayah pesisir menyebabkan kawasan ini rawan terhadap bencana lingkungan, seperti banjir saat musim hujan dan abrasi pantai. Permukiman yang tidak tertata, drainase yang buruk, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan memperparah kondisi kekumuhan di kawasan ini.

Analisis Kondisi Infrastruktur Permukiman

Permukiman kumuh di Kelurahan Banjar Ampenan menunjukkan berbagai permasalahan infrastruktur dasar yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Analisis ini difokuskan pada beberapa indikator utama, yaitu kondisi bangunan, aksesibilitas jalan, sistem drainase, air bersih dan sanitasi, serta fasilitas umum.

1. Kondisi bangunan

Sebagian besar rumah warga dibangun secara swadaya tanpa perencanaan teknis yang memadai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, banyak rumah yang menggunakan material tidak permanen seperti kayu bekas dan seng berkarat. Terdapat pula hunian semi permanen yang berdiri sangat rapat,

dengan jarak antar bangunan kurang dari 1 meter. Hal ini tidak hanya melanggar standar kelayakan hunian, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran dan penyebaran penyakit menular.



Gambar 2. Kondisi Fasad Bangunan
Sumber : Penulis

2. Aksesibilitas jalan lingkungan

Jalan lingkungan di wilayah kumuh Kelurahan Banjar umumnya sempit, tidak beraspal, dan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Di beberapa titik, jalanan berubah menjadi gang sempit selebar kurang dari 1 meter yang tidak dapat diakses kendaraan darurat seperti mobil ambulans atau pemadam kebakaran. Kondisi ini sangat menghambat mobilitas warga, terutama dalam keadaan darurat.



Gambar 3. Kondisi Aksesibilitas Jalan Lingkungan
Sumber : Penulis

3. Sistem drainase dan pengelolaan air limbah

Sistem drainase di kawasan ini tergolong sangat buruk. Saluran air tidak tertutup, sering tersumbat oleh sampah rumah tangga, dan air sering meluap saat musim hujan. Genangan yang terjadi tidak hanya merusak jalan lingkungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lembap dan menjadi tempat berkembang biak nyamuk penyebab penyakit seperti demam berdarah. Sebagian besar rumah juga tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang baik. Limbah domestik langsung dibuang ke selokan atau ke sungai terdekat.



Gambar 4. Kondisi Drainase dan Pengelolaan Limbah

Sumber : Penulis

4. Ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi

Akses terhadap air bersih masih menjadi permasalahan utama. Sekitar 30% warga mengandalkan sumur gali yang rentan tercemar, sementara sisanya bergantung pada PDAM yang alirannya tidak stabil. Fasilitas sanitasi juga terbatas; banyak rumah tidak memiliki jamban sendiri dan menggunakan jamban komunal yang kondisinya tidak terawat. Masih ditemukan beberapa warga yang buang air besar di sungai karena keterbatasan akses MCK.



Gambar 5. Sumber Air Bersih
Sumber : Penulis

5. Fasilitas umum dan pelayanan dasar

Kelurahan Banjar memiliki fasilitas umum yang terbatas, terutama di wilayah padat dan kumuh. Fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar tersedia, tetapi letaknya jauh dari permukiman kumuh dan tidak mudah dijangkau. Ruang terbuka hijau atau area bermain anak hampir tidak tersedia. Selain itu, tidak ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi di sekitar lokasi, sehingga sampah rumah tangga sering ditumpuk di pinggir jalan atau sungai.

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Permukiman kumuh di Kelurahan Banjar Ampenan tidak hanya menghadapi masalah fisik-infrastruktur, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks. Kondisi ini saling terkait dan memperkuat siklus kemiskinan yang dialami masyarakat setempat.

1. Tingkat pendidikan dan akses layanan pendidikan

Mayoritas warga di kawasan kumuh memiliki tingkat pendidikan rendah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar orang dewasa hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD), dan hanya beberapa sebagian kecil yang mencapai tingkat SMA. Rendahnya pendidikan ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang lebih layak.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas. Meskipun sekolah dasar dan menengah tersedia di luar kawasan, jaraknya cukup jauh dan tidak mudah dijangkau, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki kendaraan.

2. Mata pencaharian dan tingkat pendapatan

Sumber pencaharian utama masyarakat di kawasan ini adalah sebagai buruh harian lepas, pedagang, peternak ayam, dan pekerjaan informal lainnya. Sebagian pekerjaan tanpa kontrak kerja tetap dan penghasilan mereka tidak menentu. Rata-rata penghasilan keluarga per bulan berada di bawah upah minimum kota (UMK) Mataram.

Kondisi ini memperkuat ketergantungan ekonomi, membuat masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau kehilangan pekerjaan secara mendadak.

3. Kependudukan dan struktur keluarga

Permukiman kumuh cenderung dihuni oleh keluarga dengan jumlah anggota 5-7 orang dalam satu rumah tangga. Dalam beberapa kasus, dua atau tiga keluarga tinggal dalam satu unit rumah karena keterbatasan tempat tinggal. Kepadatan penghuni ini menyebabkan kurangnya ruang pribadi dan menurunkan kualitas hidup, terutama bagi anak-anak dan lansia.

4. Akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial

Akses terhadap fasilitas kesehatan di kawasan ini masih terbatas. Banyak warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, sehingga enggan memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyakit yang sering diderita meliputi ISPA, diare, gatal-gatal, dan penyakit kulit lainnya yang berkaitan langsung dengan kondisi sanitasi dan lingkungan.

5. Modal sosial dan dinamika sosial warga

Meskipun menghadapi keterbatasan, masyarakat di kawasan kumuh masih memiliki kekuatan dalam bentuk modal sosial. Gotong royong masih berjalan, terutama dalam kegiatan kebersihan lingkungan atau pembangunan fasilitas bersama secara swadaya. Namun, dinamika sosial seperti konflik antarwarga juga terjadi, terutama yang berkaitan dengan perebutan lahan, saluran air, atau fasilitas umum terbatas.

Dampak Lingkungan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh tidak hanya menjadi permasalahan sosial dan infrastruktur, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kondisi lingkungan sekitar. Di Kelurahan Banjar Ampenan, dampak lingkungan dari kondisi permukiman kumuh sudah terlihat jelas, terutama pada aspek pencemaran, kesehatan masyarakat, dan kerentanan terhadap bencana.

1. Pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara)

Salah satu bentuk pencemaran yang paling menonjol adalah pencemaran air. Limbah domestik dari rumah tangga seperti air bekas cucian, mandi, dan bahkan tinja dibuang langsung ke saluran terbuka atau ke sungai yang melintasi permukiman. Hal ini menyebabkan bau tidak sedap, serta penurunan kualitas air yang dapat mengganggu ekosistem sekitar.

Pencemaran tanah juga terjadi akibat pembuangan sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Sampah-sampah menumpuk di lahan kosong atau dibuang sembarangan, menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Pencemaran udara berasal dari bau limbah yang membusuk, pembakaran sampah secara terbuka, dan kelembaban tinggi yang memperparah bau tidak sedap di lingkungan permukiman.

2. Kondisi pengelolaan sampah

Sistem pengelolaan sampah di kawasan ini sangat minim. Tidak tersedia tempat pembuangan sampah resmi di dalam lingkungan permukiman, dan armada pengangkut sampah dari dinas kebersihan jarang masuk ke wilayah padat ini karena akses jalan yang sempit. Akibatnya, warga membuang sampah di saluran air, lahan kosong, atau membakarnya.



Gambar 6. Kondisi Sampah Permukiman

Sumber : Penulis

Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi sarang penyakit. Di musim hujan, tumpukan sampah menutup saluran air dan menyebabkan banjir lokal.

3. Risiko kesehatan lingkungan

Kondisi lingkungan yang tidak sehat berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit berbasis lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan warga dan petugas puskesmas, penyakit yang umum diderita mencakup diare, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), demam berdarah dengue (DBD), dan penyakit kulit. Penyakit-penyakit ini sebagian besar disebabkan oleh air yang tidak higienis, lingkungan lembab, dan keberadaan nyamuk serta lalat.

Selain itu, kualitas udara dalam ruangan di rumah-rumah yang padat dan tertutup buruk, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit, terutama pada anak-anak dan lansia.

4. Kerentanan terhadap bencana

Permukiman kumuh di Kelurahan Banjar Ampenan juga sangat rentan terhadap bencana alam, terutama banjir. Drainase yang buruk dan tingginya angka bangunan di bantaran sungai menyebabkan kawasan ini mengalami genangan setiap musim hujan. Selain itu, rumah-rumah yang terbuat dari bahan tidak permanen sangat rentan terhadap angin kencang, dan dalam beberapa kasus, kebakaran akibat korsleting listrik.

Respon Masyarakat dan Pemerintah

Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan. Di Kelurahan Banjar Ampenan, respon terhadap permasalahan permukiman kumuh telah dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Namun, efektivitasnya masih bervariasi.C

1. Upaya penataan atau intervensi pemerintah

Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan beberapa wilayah di Kelurahan Banjar sebagai kawasan kumuh ringan hingga sedang, berdasarkan indikator fisik dan sosial ekonomi. Terkait hal ini, program nasional seperti KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) pernah dijalankan dengan fokus pada perbaikan drainase, penyediaan MCK umum, paving jalur lingkungan.

Namun, keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah membuat intervensi tersebut belum merata. Dalam beberapa kasus, infrastruktur yang telah dibangun kembali rusak karena kurangnya pemeliharaan, dan belum adanya sistem kelembagaan lokal yang kuat untuk merawatnya.

2. Partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan

Partisipasi masyarakat di Kelurahan Banjar relatif aktif dalam skala kecil, seperti kegiatan gotong royong mingguan dan pembuatan saluran air secara swadaya. Beberapa warga juga secara mandiri memperbaiki jalan lingkungan dengan batu atau semen seadanya.

Namun, partisipasi ini belum sepenuhnya terorganisir. Keterlibatan warga dalam perencanaan program perbaikan lingkungan masih rendah, seringkali hanya bersifat pasif atau sekadar mengikuti instruksi dari pihak luar. Ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan lokal, seperti kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), agar partisipasi tidak hanya terbatas pada tenaga fisik tetapi juga pada pengambilan keputusan.

3. Hambatan dalam penanganan permukiman kumuh

Beberapa hambatan yang diidentifikasi dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Banjar antara lain:

- a. Keterbatasan data dasar yang akurat untuk mendukung perencanaan berbasis kebutuhan lokal.
- b. Tumpang tindih kewenangan antainstansi dalam pelaksanaan program.
- c. Minimnya kordinasi lintas sektor, terutama antara dinas PU, Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Kendala legalitas lahan, dimana beberapa hunian dibangun di atas tanah negara atau lahan sengketa, menyulitkan proses perbaikan permanen.
- e. Rendahnya kesadaran lingkungan, misalnya dalam pengelolaan sampah dan sanitasi yang masih kurang optimal.

4. Harapan masyarakat terhadap penanganan permukiiman

Melalui wawancara, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah lebih responsif dan hadir secara nyata dalam menyelesaikan masalah mereka. Beberapa usalan warga antara lain:

- a. Bantuan peningkatan rumah layak huni.

- b. Penyediaan TPS dan armada sampah yang masuk hingga ke gang sempit.
- c. Pelatihan keterampilan kerja dan pembukaan lapangan kerja lokal.
- d. Program beasiswa dan dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Analisis Sintesis: Keterkaitan Infrastruktur, Sosial-Ekonomi, dan Lingkungan

Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Banjar Ampenan merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dipisahkan antara aspek infrastruktur, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk siklus permasalahan yang saling memperkuat satu sama lain.

1. Keterkaitan infrastruktur dengan kondisi sosial-ekonomi

Buruknya infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi warga. Jalan yang sempit dan tidak layak membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta menghambat aktivitas ekonomi warga seperti berdagang atau bekerja di luar permukiman.

Sementara itu, kondisi rumah yang tidak layak dan padat menyebabkan kesehatan keluarga terganggu, terutama pada anak-anak. Akibatnya, produktivitas ekonomi warga menurun, dan pengeluaran rumah tangga meningkat akibat biaya kesehatan yang harus ditanggung secara mandiri.

2. Keterkaitan sosial-ekonomi dengan dampak lingkungan

Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Banyak warga membuang sampah sembarangan atau langsung ke sungai karena tidak memiliki akses dan pemahaman tentang pengelolaan sampah yang baik.

Selain itu, karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dan memiliki penghasilan rendah, mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperbaiki rumah, memasang septic tank, atau berlangganan layanan air bersih. Hal ini menyebabkan praktik buang air besar sembarangan dan penggunaan sumber air yang tidak higienis tetap berlangsung.

3. Keterkaitan infrastruktur dengan dampak lingkungan

Ketiadaan sistem drainase dan pengelolaan limbah yang memadai mengakibatkan banjir lokal dan pencemaran lingkungan. Air limbah yang dibuang langsung ke selokan atau sungai menyebabkan pencemaran air, sementara sampah yang menumpuk memperburuk kualitas tanah dan udara.

Kondisi ini menciptakan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat dan memicu munculnya penyakit. Rumah-rumah yang rapat dan tidak memiliki ventilasi cukup juga memperburuk kualitas udara dalam ruangan, yang sangat berbahaya bagi kesehatan penghuni.

4. Pola siklus kumuh: ketidakberdayaan struktural

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya siklus kekumuhan: infrastruktur yang buruk menyebabkan keterbatasan sosial-ekonomi, keterbatasan ekonomi memperparah kerusakan lingkungan, dan lingkungan yang

rusak semakin memperburuk kondisi infrastruktur. Tanpa intervensi komprehensif, siklus ini akan terus berulang dan memperdalam kemiskinan struktural.

KESIMPULAN

Permukiman kumuh di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram menunjukkan kondisi lingkungan yang memprihatinkan akibat keterbatasan infrastruktur dasar, buruknya tata ruang, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat. Kawasan yang berada di dataran rendah dan dekat dengan bantaran sungai serta garis pantai ini menghadapi risiko tinggi terhadap bencana lingkungan seperti banjir dan abrasi.

Analisis menunjukkan bahwa kondisi bangunan di wilayah tersebut umumnya tidak layak huni, dibangun secara swadaya dengan material seadanya dan kepadatan tinggi. Aksesibilitas jalan lingkungan sangat terbatas, sistem drainase buruk, dan pengelolaan air limbah tidak memadai. Keterbatasan air bersih dan sarana sanitasi, terutama jamban pribadi, memperburuk kondisi kesehatan lingkungan. Sementara itu, fasilitas umum dan pelayanan dasar seperti TPS, ruang terbuka hijau, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih belum terpenuhi secara merata.

Dari sisi sosial ekonomi, mayoritas warga tergolong dalam kelompok berpenghasilan rendah dengan tingkat pendidikan yang rendah pula. Hal ini menyebabkan rendahnya daya dukung masyarakat dalam memperbaiki kualitas hunian dan lingkungan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Banjar memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup peningkatan infrastruktur dasar, penataan ruang yang partisipatif, serta program pemberdayaan sosial dan ekonomi berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspriyanti, C. D., Nimita, F., & Deviana, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Permukiman Pesisir Kampung Tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.37253/jad.v1i2.1501>
- Etqia Hanina, S., Haida Ramdani, R., Yundarisman, M., Thahira Alfa Tsani, B., Muhammad Gantara Ranusman, L., & Jayatri Putra, P. (2024). Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh di RT 08 Kawasan Permukiman Bantaran Sungai Jangkok. *Krinok: Jurnal Arsitektur Dan Lingkung Bina*.
- Firman, T. (2004). New town development in Jakarta Metropolitan Region: A perspective of spatial segregation. *Habitat International*, 28(3), 349–368. [https://doi.org/10.1016/S0197-3975\(03\)00037-7](https://doi.org/10.1016/S0197-3975(03)00037-7)
- Gobel, F. F., & T. Zees, E. A. (2022). Faktor Pengaruh dalam Pembentukan Permukiman Kumuh di Desa Pohuwato Timur. *ARSITEKTURA*, 20(1), 99. <https://doi.org/10.20961/arst.v20i1.55383>
- Handryant, N. (2011). PERMUKIMAN KUMUH, SEBUAH KEGAGALAN PEMENUHAN ASPEK PERMUKIMAN ISLAMI. *Journal of Islamic Architecture*, 1, 144–144.
- Indriani, I. (2017). FORMASI SPASIAL PERMUKIMAN KUMUH KOTA STUDI KASUS: PERUBAHAN POLA RUANG BERMUKIM PADA LAHAN DI JALAN SERSAN SANI PALEMBANG. *Jurnal Arsitektur Arsir*.
- Saputra, W., & Hapiz Hermansyah, M. (2022). PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN: PENYEBAB, DAMPAK DAN SOLUSI. *Enviromental Science*

- Journal (ESJo): Jurnal Ilmu Lingkungan. <http://journal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/esjo>
- United Nations Human Settlements Programme. (2016). URBANIZATION AND DEVELOPMENT Emerging Futures.
- Upaya, E., Sampah, P., Pemukiman, D. I., Sukmaniar, K., Saputra, W., & Anggraini, P. (2023). UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI PEMUKIMAN KUMUH. Environmental Science Journal (ESJo): Jurnal Ilmu Lingkungan, 2(1). <http://journal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/esjo>
- Yuliani, S. A. (2019). Penataan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kelurahan Kertapati, Palembang Sumatera Selatan. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA BERKELANJUTAN.